

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdullah Marlang dan Rina Maryana. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Sleman: Pustaka Itifada.

Aminuddin Salle et al. 2010. *Hukum Agraria*. Makassar: A.S. Publishing.

AP Parlindungan. 2009. *Pendaftaran Tanah Diindonesia (PP No.24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan PP No.37 Tahun 1998*. Bandung: CV. Mandar Maju.

As'ad Said Ali. 2010. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Bagir Manan. 2000. *Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Kumpulan Kuliah Pascasarjana (S3) FH Universitas Padjadjaran.

Bernard Limbong. 2014. *Opini Kebijakan Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kedua Belas. Jakarta: Djembatan.

Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta.

Dahuri Rokhmin. dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita. Jakarta

Franz Magnis Suseno. 2006. *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hayatul Ismi. 2017. *Menguji Keadilan Pancasila Dalam Menjaga Kedaulatan Rakyat Atas Tanah*, dalam Al Khanif. Et al (ed). *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.

2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural. Historis. Filosofis. Yuridis Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.

MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.



Maria S.W Soemardjono. 2009. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Noer Fauzi Rachman. 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Jakarta:

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada. Media Group. Jakarta.

Rokhmin Dahuri. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sri Susyanti Nur. 2010. *Bank Tanah*. Makassar: As Publishing.

-----, 2010. *Urgensi Bank Tanah*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Sungeng Budiharsono. 2005. *Tehnik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sukarno. 2015. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Cetakan I. Jakarta: P.T. Buku Seru.

Suparma A. Diraputra. 2001. *Sistem Hukum dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor: PKSPL IPB.

Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

Urip Santoso. 2009. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Publikasi Ilmiah

Achmad Sodiki. 2000. *Empat Puluh Tahun Masalah Dasar Hukum Agraria. Pidato Pengukuhan Guru Besar. dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.*

Ahmad Basarah dan Hasanuddin. Tb. (Ed). 2016. *Historitas dan Spiritualitas Pancasila: Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila*. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI.

Sayuna. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas*



Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Kahar. 2016. *Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan.* Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Naskah Akademik Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Naskah Akademik Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU PWP3K .

Novianto M. Hantoro. 2012. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah. Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Sukirno. *Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat.* Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 39 No. 1 Maret 2010.

Sukirno. 2014. *Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Hak Ulayat (Studi Pengakuan Dan Perlindungan Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy Dari Hegemoni Negara).* Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Internet

Asis Nurul Syawal. 2018. *Kerentanan Wilayah Terhadap Gelombang Ekstrem di Pesisir Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Dam. Kenneth W. *Land, Law And Economic Development.* Dikutip dari https://www.Brookings.Edu/WpContent/Uploads/2016/06/200601dam_2.Pdf.

Farida Patittingi. 2018. *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.* diakses dari <http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/168/>

...wls dalam Farida Patittingi. 2018. *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia.*



diakses dari
<http://www.jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/download/168/148>.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia*. Jurnal Perspektif Hukum Vol. 15 No. 1 Mei 2015. diakses dari <https://disperkim.samarindakota.go.id/asset/filelib/ads/22-34-1-PB.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

